

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya laporan keberlanjutan semakin diperkuat oleh tuntutan konsumen yang semakin sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (Christensen dkk., 2021). Selain itu, para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum, semakin memperhatikan bagaimana perusahaan manajemen risiko sosial dan lingkungan, serta bagaimana perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Christensen dkk., 2021). Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan global untuk transparansi, banyak perusahaan telah mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan lingkungan, keberlanjutan sosial, etika bisnis, dan pengelolaan risiko (Nelson & Meiden, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana perusahaan-perusahaan berkinerja dari segi keberlanjutan selama periode waktu yang diteliti.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam laporan keberlanjutan sesuai dengan *Global Reporting Initiative (GRI)* terdiri dari dua grup, yaitu prinsip untuk menentukan isi laporan (*Content Principles*) dan prinsip untuk menentukan kualitas laporan (*Quality Principles*). *Content Principles* adalah alam laporan keberlanjutan merupakan proses sistematis yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan menentukan informasi apa saja yang relevan untuk dimuat dalam laporan. Prins ini terdiri dari keterlibatan pemangku kepentingan

(*Stakeholder Inclusiveness*), konteks keberlanjutan (*Sustainability Context*), Materialitas (*Materiality*), dan kelengkapan (*Completeness*).

Quality Principles dalam laporan keberlanjutan merupakan panduan yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki mutu yang memadai, baik dari segi akurasi maupun kelayakan penyajian. Prinsip ini terdiri dari keseimbangan (*Balance*), keterbandingan (*Comparability*), Akurasi (*Accuracy*), ketepatan waktu (*Timeliness*), Kejelasan (*Clarity*), dan Keandalan (*Reliability*). Dalam skala internasional, arahan penyusunan laporan keberlanjutan mengarah pada pengikutan standar GRI, yang diharapkan dapat dipisahkan dari laporan keuangan atau laporan tahunan suatu perusahaan.

Kualitas pengungkapan dalam laporan keberlanjutan yang sesuai dengan *Quality Principles* mampu mencerminkan representasi yang lebih akurat terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan (Minutiello & Tettamanzi, 2022). Temuan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Hadriyani dan Dewi (2022) dari segi aspek Green Accounting, melalui kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan.

Standar GRI atau GRI Standards memaknai pelaporan keberlanjutan sebagai suatu praktik yang mencakup pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal (Abeysekera, 2022). Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan.

National Center for Corporate Reporting (NCCR) merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 2005 dan pertama kali memperkenalkan laporan keberlanjutan di Indonesia. Kegiatan NCCR pada awalnya adalah untuk

mensosialisasikan sistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia berdasarkan Buku Pegangan Laporan Keberlanjutan yang dibuat oleh *Association of Chartered Certified Accountants United Kingdom* (ACCA UK) bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia. Pada tahun 2011, NCCR ditunjuk oleh GRI sebagai *Official* GRI Training Partner untuk Asia Tenggara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hingga akhir tahun 2018, NCSC telah memiliki sekitar 1.800 alumni (pemegang sertifikat CSRS) yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk 15 alumni dari Bangladesh(NCCR, n.d.).

Tren laporan keberlanjutan di negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) juga meningkat sejalan dengan pembentukan komunitas ASEAN CSR Network (ACN) melalui *ASEAN Foundation*. Negara-negara ASEAN memiliki lokasi geografis yang unik, oleh karena itu, tidak mudah untuk menjembatani isu keberlanjutan lingkungan dengan pembangunan ekonomi kawasan lain. Pertumbuhan tinggi sektor ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan tidak diimbangi dengan perhatian terhadap lingkungan dan investasi sosial. Akibatnya, hal itu dapat menjadi masalah bagi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang (Loh dkk., 2016). Oleh karena itu, ASEAN CSR Network memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan agenda CSR seluruh ASEAN ke dalam visi dan misi perusahaan. Lebih jauh, diharapkan bahwa investasi tersebut akan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, dengan demikian, akan membuat negara-negara ASEAN menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali (Loh dkk., 2016)

Perusahaan perbankan memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan memberikan layanan keuangan yang krusial untuk masyarakat (Ismamudi dkk., 2023). Meskipun bank tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan fisik yang berkelanjutan, peranannya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tahun 2030 tidak dapat diabaikan (Ecer & Pamucar, 2022). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, sektor perbankan memiliki pengaruh besar terhadap arah aliran modal, yang secara tidak langsung berdampak pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberlanjutan sektor ini menjadi krusial mengingat posisi strategisnya sebagai jantung sistem keuangan nasional (Ananda & Werastuti, 2022).

Sektor perbankan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran sentral dalam menggerakkan perekonomian dan memengaruhi arah pembangunan berkelanjutan melalui fungsi intermediasi keuangannya. Bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan alokasi pembiayaan ke sektor-sektor yang mendukung prinsip keberlanjutan, seperti energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan usaha mikro yang inklusif.

Berdasarkan laporan *Sustainable Banking Assessment 2024* yang diterbitkan WWF-Singapore, bank di kawasan Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Namun demikian, laporan tersebut juga menyoroti tantangan penting, seperti kurangnya konsistensi dalam standar pelaporan, keterbatasan transparansi, dan perbedaan tingkat kematangan praktik keberlanjutan antar negara.

Selain itu, lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Malaysia, dan Singapore *Exchange* (SGX) telah mewajibkan atau mendorong perusahaan, khususnya sektor keuangan, untuk menyampaikan laporan keberlanjutan secara berkala. Hal ini menjadikan sektor perbankan sebagai salah satu industri yang tidak hanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, tetapi juga paling siap secara data untuk dievaluasi kualitas pelaporannya. Dengan demikian, pemilihan sektor perbankan dalam penelitian ini didasarkan pada peran strategisnya dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), eksistensi regulasi pelaporan keberlanjutan di ketiga negara, serta relevansinya dalam konteks integrasi ESG dalam proses pengambilan keputusan.

Gutiérrez-Ponce dan Wibowo (2024) menyimpulkan bahwa bank perlu mempertimbangkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan sebagai bagian integral dari kerangka manajemen risiko mereka. Informasi ini berfungsi untuk melengkapi laporan risiko konvensional dan memperkuat pengelolaan risiko non-keuangan yang semakin relevan. Selain adanya tekanan regulasi yang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keberlanjutan, meningkatnya permintaan dari investor terhadap produk dan layanan berbasis prinsip keberlanjutan juga menjadi pendorong utama. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Sandhi dkk. (2024) yang menyebutkan bahwa pengungkapan ESG perusahaan, terutama tata kelola atau *governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi pasar.

Di Indonesia, perhatian terhadap keberlanjutan perusahaan mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap isu ESG. Pemerintah

melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan POJK No. 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan setiap tahun. Regulasi ini menjadi langkah konkret dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan, khususnya sektor perbankan yang memiliki peran strategis dalam pengaliran dana dan pengambilan keputusan investasi. Namun demikian, dalam praktiknya, kualitas pengungkapan dalam laporan keberlanjutan di sektor perbankan Indonesia masih menunjukkan tingkat variasi yang cukup tinggi. Penelitian Sutadji dkk. (2024) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan keberlanjutan antar bank masih sangat bervariasi. Dalam analisis terhadap empat bank utama BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, terungkap bahwa tingkat pengungkapan topik spesifik aspek ekonomi berdasarkan GRI Standards masing-masing berada pada kisaran 57% hingga 93%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa belum semua bank secara konsisten mengungkapkan informasi keberlanjutan sesuai dengan standar yang berlaku.

Variasi ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan skala aset, kebijakan internal bank, atau tingkat pemahaman dan kesadaran masing-masing bank terhadap pentingnya pelaporan keberlanjutan. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa meskipun pelaporan keberlanjutan telah diwajibkan melalui POJK, kualitas dan kedalaman pengungkapannya masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Di Malaysia, pelaporan keberlanjutan telah menjadi kewajiban bagi perusahaan tercatat di Bursa Malaysia sejak tahun 2016. Sebagai bentuk penguatan

terhadap komitmen ini, pada September 2022, Bursa Malaysia menerbitkan Sustainability Reporting Guide edisi ketiga yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan 22 indikator keberlanjutan umum yang mencakup 11 isu keberlanjutan utama. Meskipun pelaporan tersebut dapat disusun dengan mengacu pada berbagai kerangka kerja, seperti *Global Reporting Initiative (GRI) Standards*, *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, maupun *Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*, fleksibilitas dalam pemilihan kerangka pelaporan ini justru menimbulkan tantangan tersendiri.

Ketidakkonsistenan dalam metodologi dan standar yang digunakan menyulitkan proses perbandingan antar perusahaan, terutama dalam menilai kualitas pengungkapan keberlanjutan (PwC, 2024). Hingga Mei 2024, analisis PwC menunjukkan bahwa 38% dari 100 perusahaan tercatat teratas di Bursa Malaysia telah melibatkan pihak independen untuk melakukan assurance terhadap laporan keberlanjutan mereka meningkat signifikan dari 21% pada tahun sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas dan kredibilitas laporan keberlanjutan menjadi perhatian yang semakin penting, khususnya di sektor perbankan yang berperan sebagai penggerak pendanaan bagi sektor-sektor lainnya.

Di Singapura, perhatian terhadap isu keberlanjutan dan iklim telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pasar modal dan praktik pelaporan perusahaan. Singapore Exchange (SGX) menerapkan pendekatan bertahap terhadap pelaporan iklim yang mewajibkan perusahaan di sektor keuangan, energi, serta pertanian dan kehutanan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan berbasis rekomendasi *Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)*. Sementara itu, perusahaan dari sektor lain diwajibkan mengikuti pendekatan *comply or explain*

hingga pelaporan iklim menjadi wajib bagi seluruh perusahaan tercatat mulai tahun buku 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Singapura dalam mendorong transparansi informasi ESG sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim. Penelitian Gutiérrez-Ponce & Wibowo (2024) menunjukkan tingkat pengungkapan ESG di Singapura mengalami peningkatan signifikan, dari sebelumnya 33% di tahun 2010 menjadi 73% di tahun 2020 dalam kurun waktu satu dekade.

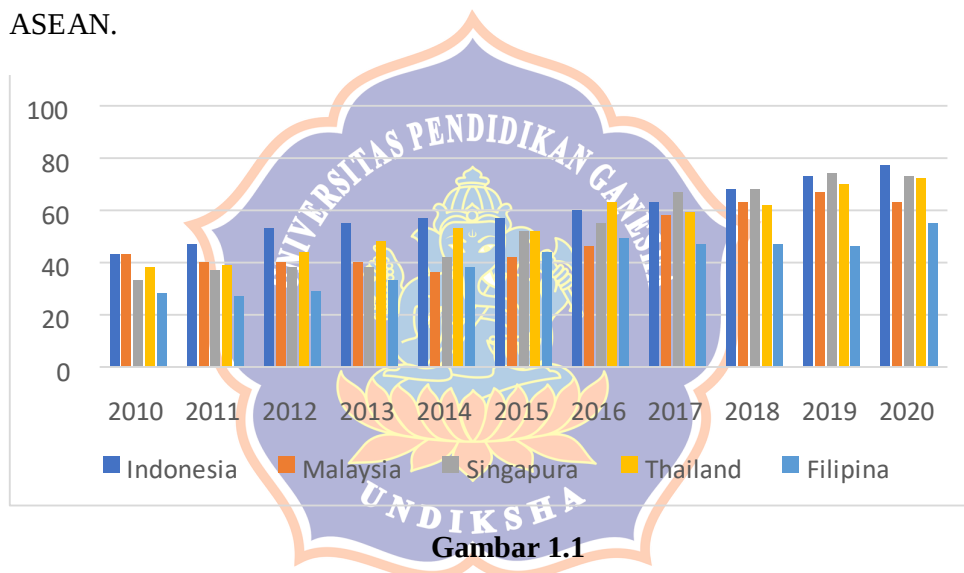
Meskipun belum menjadi pelaporan yang sepenuhnya seragam di seluruh sektor, kemajuan ini menempatkan Singapura sebagai salah satu negara dengan perkembangan pelaporan keberlanjutan tercepat di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini menjadikan Singapura sebagai konteks yang relevan untuk dibandingkan dalam studi komparatif kualitas pengungkapan keberlanjutan di sektor perbankan.

Pemilihan Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai objek studi komparatif didasarkan pada karakteristik masing-masing negara yang mencerminkan spektrum perkembangan ekonomi dan regulasi pelaporan keberlanjutan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia dikategorikan sebagai negara berkembang, sedangkan Singapura merupakan negara maju dengan sistem keuangan dan regulasi pelaporan yang lebih matang.

Pemilihan ketiga negara ini juga mempertimbangkan konteks geografis dan integrasi regional dalam kerangka ASEAN, di mana ketiganya merupakan pusat ekonomi utama yang memiliki sektor perbankan yang berkembang pesat serta menjadi pionir dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Selain itu, ketiganya telah memiliki kebijakan pelaporan keberlanjutan yang aktif baik melalui peraturan

OJK di Indonesia, Bursa Malaysia, maupun Singapore *Exchange* (SGX) yang memungkinkan dilakukan perbandingan kualitas pengungkapan keberlanjutan secara objektif.

Dengan memilih negara yang merepresentasikan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan variasi implementasi pelaporan keberlanjutan secara lebih menyeluruh dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan lintas negara di kawasan ASEAN.



Gambar 1.1

Grafik pengungkapan ESG perusahaan perbankan di Asia Tenggara

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan tingkat pengungkapan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, selama periode 2010 hingga 2020. Secara umum, terjadi tren peningkatan tingkat pengungkapan ESG di seluruh negara yang diamati. Indonesia mencatatkan peningkatan yang paling signifikan, dari 43% pada tahun 2010 menjadi 77% pada tahun 2020. Sementara itu, Singapura dan Malaysia juga menunjukkan perkembangan positif, dengan tingkat

pengungkapan ESG masing-masing mencapai 73% dan 72% pada tahun 2020.

Pendekatan komparatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau kondisi tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta karakteristik khusus dari masing-masing objek. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan sektor perbankan di tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masing-masing negara mengimplementasikan pelaporan keberlanjutan berdasarkan *GRI Standards*, serta mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) maupun tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan temuan deskriptif, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas terhadap posisi relatif dari tiap negara dalam hal kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan kajian hasil penelitian terdahulu, sebagian besar studi komparatif dalam pelaporan keberlanjutan lebih banyak difokuskan pada sektor selain perbankan, seperti konstruksi dan telekomunikasi (Astuti dkk., 2019; Alfarisa dkk., 2023; Hamzah dkk., 2023). Selain itu, sebagian besar studi hanya membandingkan dua negara atau perusahaan tertentu tanpa memperluas cakupan ke tiga negara sekaligus dalam satu wilayah regional. Penelitian penelitian tersebut juga umumnya belum secara spesifik mengevaluasi kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan *GRI Standards* yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penelitian sebelumnya yang membandingkan

pengungkapan keberlanjutan lintas negara cenderung berfokus pada sektor manufaktur, energi, atau telekomunikasi. Hingga saat ini, kajian komparatif kuantitatif yang menggunakan *GRI Standards* dalam mengukur kualitas laporan keberlanjutan di sektor perbankan, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Singapura masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan studi komparatif yang menilai kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan pada sektor perbankan di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, melalui pendekatan kuantitatif yang sistematis berdasarkan *GRI Standards*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut.

1. Masalah utama yang mendasari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman tentang perbedaan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan di antara perusahaan multinasional sektor perbankan yang beroperasi di berbagai negara. Penelitian ini akan mencoba untuk membandingkan kualitasm pengungkapan. Laporan keberlanjutan perusahaan sektor perbankan di Indonesia, Malaysia, dan Singapura dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai *GRI Standards*.
2. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memahami dan membandingkan kinerja keberlanjutan di antara bank-bank regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini akan membatasi fokusnya pada bank-bank regional di kawasan Asia Tenggara, khususnya Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kendati kawasan ini mewakili variasi kondisi ekonomi dan regulasi, hasil penelitian mungkin tidak secara langsung dapat diterapkan pada konteks regional yang lebih luas.
2. Periode waktu yang akan digunakan dalam analisis adalah periode 2023-2024. Dengan membatasi periode waktu ini, penelitian dapat lebih fokus pada kondisi dan dinamika keberlanjutan yang lebih kontemporer.
3. Penelitian ini akan memfokuskan pada sejumlah indikator keberlanjutan yang relevan, seperti Indikator lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kendati mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, penelitian mungkin tidak mencakup seluruh keragaman dimensi keberlanjutan yang mungkin relevan untuk beberapa pemangku kepentingan.
4. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data sekunder dari laporan keberlanjutan yang telah diterbitkan. Metode ini dapat memberikan wawasan mendalam, namun membatasi penelitian dari sudut pandang Kuantitatif atau pengumpulan data primer langsung dari pihak terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disimpulkan berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI *Standards* dalam kategori ekonomi di antara bank-bank

regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia?

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI *Standards* dalam kategori lingkungan di antara bank-bank regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI *Standards* dalam kategori sosial di antara bank-bank regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui perbedaan yang signifikan dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI *Standards* dalam kategori ekonomi di antara bank-bank regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia.
2. Mengetahui perbedaan yang signifikan dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI *Standards* dalam kategori lingkungan di antara bank-bank regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia.
3. Mengetahui perbedaan yang signifikan dalam laporan keberlanjutan berbasis GRI *Standards* dalam kategori sosial di antara bank-bank regional di ASEAN, khususnya di Singapura, Malaysia, dan Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori keberlanjutan, terutama dalam konteks regional ASEAN. Dengan mengidentifikasi perbedaan dan kemiripan praktik keberlanjutan di antara bank-bank regional, penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan baru dan memperkaya literatur tentang implementasi keberlanjutan di tingkat regional. Hasil penelitian ini dapat membentuk dasar untuk penelitian lanjutan di bidang Akuntansi Keberlanjutan, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang aspek-aspek khusus, metodologi, dan konteks regional atau sektor yang berbeda.

Selain itu, penelitian ini turut memperkuat relevansi *Stakeholder Theory* dalam konteks pelaporan keberlanjutan di sektor perbankan. Dengan mengevaluasi kualitas pengungkapan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, penelitian ini menunjukkan sejauh mana bank merespons ekspektasi pemangku kepentingan melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel. Hasil ini mendukung premis utama *Stakeholder Theory* bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terdampak oleh operasional perusahaan, khususnya dalam mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan Perbankan

Hasil penelitian dapat memberikan panduan bagi bank-bank regional di ASEAN dalam merancang dan meningkatkan praktik bisnis berkelanjutan mereka. Ini dapat mencakup pemahaman terperinci tentang praktik ESG yang efektif dalam

meningkatkan kinerja dan reputasi.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan di sektor perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi lebih sadar dan mendukung bank-bank yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Bagi Regulator

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga pengawas dan pembuat kebijakan di sektor keuangan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah diterapkan terkait pelaporan keberlanjutan. Temuan penelitian dapat membantu regulator dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, mendorong transparansi, dan meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan, khususnya dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sesuai dengan standar internasional seperti GRI. Dengan demikian, regulator dapat memperkuat peran sektor perbankan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun regional

